

BAB II
POLITIK LUAR NEGERI TURKI SEBELUM PEMERINTAHAN
ERDOGAN

Hubungan Turki dan Uni Eropa adalah hubungan antara sebuah negara dan sebuah lembaga yang berjalan secara baik. Mereka saling berbagi prinsip-prinsip dan norma yang sama. Keduanya adalah *partner* yang sebenarnya sama-sama saling mempengaruhi. Bagi Turki, hubungannya dengan cikal bakal Uni Eropa merupakan sebuah ikatan sejarah yang sudah terhubung sejak lama sekali. Turki mengakui bahwa mereka sama-sama saling mempengaruhi dalam perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya (Turkey-EU Relations). Sedangkan bagi Uni Eropa, keberadaan Negara Turki dinilai sangat penting. Jika dikomparasikan, maka dalam lingkungannya sebagai Negara tetangga, Turki setara dengan Rusia. Dalam kancah global, Uni Eropa menempatkan Turki pada posisi setelah Amerika dan Cina (Tocci, 2014, p. 1).

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hubungan Turki dengan Uni Eropa sebelum pemerintahan Erdogan. Dimulai dengan hubungan Kerajaan Ottoman dengan negara anggota Uni Eropa yang memulai sebuah persahabatan. Dilanjutkan dengan hubungan Turki saat menjadi Republik Turki yang diisi dengan hubungan Turki dengan NATO dan upayanya menjadi anggota Uni Eropa. Para pemimpin sebelum Erdogan setelah Kerajaan Ottoman lebih ke arah Barat dan sekulerisme.

A. Politik Luar Negeri Sebelum Masa Erdogan (Sekularisme)

Keputusan Kekaisaran Ottoman untuk memasuki Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 ternyata menjadi suatu kesalahan yang besar. Kekaisaran yang dijalankan oleh kediktatoran dipimpin oleh “Tiga Pasha” yang secara sepihak memasuki perang di pihak Jerman, melawan Inggris, Prancis, dan Rusia. Kekaisaran Ottoman diserbu dari selatan dengan Inggris, dari Timur oleh Rusia, dan oleh orang Yunani di Barat. Pada tahun 1918 ketika perang berakhir, kekaisaran dibagi dan diduduki oleh sekutu menang, hanya menyisakan dataran tinggi Anatolia pusat di bawah kendali Turki asli (Alkhateeb, 2013).

Mustafa Kemal dilihat dari sejarah Islam membantu mendorong agenda nasionalisnya. Menggunakan identitas Turki sebagai titik kumpul, ia berhasil menyatukan mantan perwira Ottoman di bawah komandonya dalam Perang Kemerdekaan Turki pada awal tahun 1920 dan mengusir pasukan pendudukan orang-orang Yunani, Inggris, dan Perancis, yang telah menjajah tanah Turki setelah Perang Dunia I. Dengan 1922, Kemal berhasil sepenuhnya membebaskan Turki dari pendudukan asing dan menggunakan kesempatan untuk mendirikan Republik modern Turki, dipimpin oleh Majelis Nasional Grand (GNA) di Ankara. Pada kepala pemerintah Turki yang baru adalah presiden, dipilih oleh GNA. Pilihan alami adalah Mustafa Kemal, pahlawan Perang Kemerdekaan, yang diberi julukan “Atatürk”, yang berarti “Bapak Turki”. Pada awalnya, pemerintah Turki yang baru tampak mewarisi peran pemerintah Ottoman sebagai penegak Islam. Konstitusi baru yang disusun oleh GNA menyatakan

bahwa Islam adalah agama resmi negara Turki dan bahwa semua hukum harus diperiksa oleh panel ahli hukum Islam, untuk memastikan mereka tidak bertentangan dengan syariat (Alkhateeb, 2013).

Sistem pemerintah yang baru ini ternyata tidak bisa digunakan, jadi selama berjalan, Turki menjalankan dua kepemimpinan, di Ankara dan di Istanbul, yang dipimpin oleh Sultan Ottoman. Ankara dan Istanbul mengklaim kedaulatan atas Turki, dan memiliki tujuan terus terang bertentangan. Atatürk memecahkan masalah ini pada tanggal 1 November 1922. Atatürk menghapuskan kesultanan Ottoman yang telah ada sejak 1299, dan secara resmi ditransfer kekuatannya ke GNA. Namun, ia tidak segera menghapuskan kekhalifahan. Ia mengizinkan kekhalifahan Ottoman untuk terus eksis, meskipun tanpa kekuasaan resmi, hanya sebagai figur simbolik (Alkhateeb, 2013).

Kebangkitan politik Islam di Turki berakar pada reformasi yang dilakukan pada periode Ottoman akhir dan dalam transformasi politik dilakukan setelah berdirinya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam upaya 1923. Atatürk mengubah Turki menjadi negara yang modern, bergaya Western, negara sekuler pada dasarnya merupakan “revolusi dari atas”. Dalam melaksanakan transformasi ini, elit membuat sedikit usaha membujuk penduduk juga oposisi. Dogu Ergil mencatat, "Baik sekularisasi maupun Turkification bangsa dinegosiasikan dengan orang-orang dengan cara yang serius.

Mustafa Kemal Atatürk sepertinya ingin melepaskan segala hal yang berhubungan dengan unsur Islam di Turki. Mustafa Kemal Atatürk

membuang semua unsur di Era Ottoman, kecuali beberapa unsur kemegahan masa lalu, dan memperbaharainya dengan Westernisasi dan sekularisme. Pada dekade pertama setelah berdirinya republik, Kemal melakukan serangkaian reformasi yang memutuskan hubungan Turki dengan masa lalu Islam dan untuk dunia Islam secara lebih luas. Kekhalifahan yang dipimpin oleh pemimpin spiritual dunia Muslim Sunni dihapuskan. Abjad Latin (dimodifikasi untuk mengakomodasi suara Turki) diperkenalkan menggantikan tulisan Arab, dan usaha dibuat untuk membersihkan bahasa Turki kata-kata dari bahasa Arab. Kemal juga mengganti agar jas daripada pakaian tradisional. Semua lembaga keagamaan dan sumber daya dibawa di bawah kendali negara (Rabasa, 2008). Di bawah komando Mustafa Kemal Attaturk, Turki mengadopsi nilai-nilai ideologi Barat dalam sendi-sendi pemerintahannya melalui program reformasi politik yang berwacanakan westernisasi dan modernisasi.

Namun, sebagian besar dari reformasi tersebut terbatas pada pusat-pusat kota; pedesaan sebagian besar tetap tak tersentuh. Sampai tahun 1950-an, sebagian besar penduduk Turki tetap terisolasi dan tradisional, sementara pusat-pusat perkotaan yang modern dan sekuler. Selain itu, agama tidak sepenuhnya ditekan atau dihilangkan. Ia hanya dibuang dari ruang publik dan diawasi oleh negara, melalui Direktorat Urusan Agama (Diyanet). Akibatnya, lembaga keagamaan menjadi pelengkap negara, dengan personil mereka bertindak sebagai PNS. Di pedesaan, bagaimanapun, Islam terus memiliki akar sosial yang kuat dan tetap

sebagian besar di luar kontrol negara meskipun larangan perintah agama (tarikatar) diperkenalkan pada tahun 1925. Efek lainnya adalah dimulainya penggunaan Kalender Masehi seperti di negara-negara Barat dibandingkan Kalender Hijriyah, dan penggunaan kata Tanri ketimbang Allah. Kemudian Hagia Sophia yang diubah lagi menjadi museum, pelarangan pengajaran agama Islam, dan pembatasan jumlah masjid (Rabasa, 2008).

Republik Turki pada awal berdiri memiliki kebijakan luar negeri Turki yang didasarkan pada prinsip Atatürk “damai di rumah, damai di dunia”. Sebagai negara yang baru merdeka, tujuan utama Turki adalah untuk diakui oleh Barat. Selama periode ini, upaya dilakukan untuk mengakhiri masalah warisan dari Kekaisaran Ottoman dan yang tidak dapat diselesaikan dengan Perjanjian Lausanne.

Ini termasuk sengketa perbatasan dengan Suriah atas Hatay, masalah Provinsi Mosul dengan Inggris, kepastian sekolah-sekolah misionaris dengan Perancis, dan isu Selat. Hatay bergabung wilayah Turki pada tahun 1939 setelah perselisihan panjang dan negosiasi antara Turki dan Perancis. Demikian pula, ada sengketa yang berlarut-larut lebih dari Mosul antara Inggris dan Turki. Namun, tidak seperti Hatay, Mosul tetap berada di luar wilayah Turki. Akhirnya, masalah dengan Selat disimpulkan dengan Konvensi Montreux pada tahun 1936, yang memberikan kontrol dan kedaulatan Selat ke Turki (Foreign Policy of the Turkish Republic, 2011).

Sikap Turki sebelum dan selama Perang Dunia Kedua memilih untuk tetap netral. Meskipun tekanan yang cukup banyak, Turki mengikuti kebijakan netralitas dan keseimbangan untuk tetap keluar dari perang. Kondisi selama tahun bipolaritas dalam kondisi sistem dunia mendorong Turki ke arah bergerak dengan Blok Barat. Aspirasi Uni Soviet untuk mengubah sistem yang ditetapkan oleh Konvensi Montreux mengenai rezim Selat Turki dan tuntutan Soviet bersamaan memaksa Turki untuk bergabung dengan Blok Barat. Berada di garis depan pertempuran melawan ancaman komunis, Turki menerima bantuan militer dan keuangan dari Amerika Serikat di bawah Doktrin Truman dan kemudian *Marshall Plan*.

Turki mengakui negara Israel tak lama setelah berdirinya pada tahun 1949 dan menjadi negara Muslim pertama yang melakukannya. Langkah politik ini tidak disambut baik oleh negara-negara Timur Tengah dan hubungan Turki dengan Timur Tengah tetap dingin. Pentingnya posisi geografis dan militer kunci menyebabkan Turki menjadi anggota NATO pada tanggal 18 Februari 1952. Sebagai jaminan keanggotaan ini, Turki mengirim pasukan untuk Perang Korea dengan Amerika Serikat. Pada tahun-tahun antara tahun 1960 dan 1980, isu Siprus berada di pusat agenda kebijakan luar negeri Turki dan Turki mengikuti jalan yang relatif otonom dalam menangani masalah ini. pentingnya peningkatan militer Turki memukul semua waktu tinggi dengan insiden U-2 pada tahun 1960 dan Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962. Timur dan Barat Blocs menghadapi

risiko utama dari bentrok, tapi akhirnya datang ke kesepakatan atas timbal balik menghapus semua rudal yang terletak di Turki dan Kuba

Pada tanggal 27 Mei, bersamaan dengan berkembang bermuatan militer, ada kudeta militer di Turki. Sementara ekonomi Turki mulai menjadi tergantung pada bantuan yang datang dari Barat Blok, politik domestik negara itu juga menjadi militer. Namun, surat Presiden Johnson pada tahun 1964 memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat dan wajib Turki untuk mencari cara diversifikasi hubungan internasional dengan Uni Soviet dan negara-negara lain di dunia. Surat ini dirumuskan memiliki tujuan mencegah intervensi Turki di Siprus, juga menyiratkan bahwa Blok Barat tidak akan mendukung Turki melawan serangan Soviet mungkin harus intervensi terjadi. Meskipun surat itu, Angkatan Bersenjata Turki melaksanakan Operasi Siprus pada tahun 1974, makhluk ini diikuti oleh embargo Amerika di Turki antara tahun 1975 dan 1978.

Hubungan dengan Yunani telah sangat tegang dari awal dan daftar masalah adalah satu panjang, di samping masalah Siprus antara tahun 1975 dan 1980. Masalah-masalah lain konflik muncul antara Yunani dan Turki atas hak-hak kedaulatan di Laut Aegea, mengenai misalnya lebar wilayah perairan, wilayah udara nasional, penetapan batas landas kontinen, kontrol penerbangan internasional, dan kedaulatan beberapa pulau kecil tak berpenghuni. Proyek Uni Eropa Turki pertama dimulai dengan permohonan keanggotaan asosiasi di Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1959, dan ini ternyata menjadi kontes dengan Yunani. Pada 12 September 1963 Turki menandatangani Perjanjian Ankara, yang

juga dikenal sebagai “Perjanjian Membuat Asosiasi antara Republik Turki dan Masyarakat Ekonomi Eropa”. Namun, pada tahun 1981 Yunani menjadi anggota penuh EEC dan Turki kehilangan kontes.

Proses menciptakan Turki Bea Cukai Uni disela oleh kudeta militer pada 12 September 1980, dan Angkatan Bersenjata Turki diatur negara selama tiga tahun ke depan. Pada tahun-tahun pasca-kudeta catatan buruk ekonomi mulai berubah. Hal ini dikreditkan ke Turgut Özal, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi. Ia mendukung kebijakan IMF dan tujuan utamanya adalah integrasi Turki dalam ekonomi global melalui privatisasi dan perusahaan bisnis besar. Pada tahun 1989, Özal menjadi Presiden kedelapan Turki dan mengambil alih kebijakan luar negeri sendiri, menempatkan parameter ekonomi di jantung kebijakan luar negeri negara itu (Foreign Policy of the Turkish Republic, 2011).

Dengan runtuhnya Uni Soviet dan di usia dunia unipolar, geopolitik pentingnya Turki menurun. Negara-negara yang baru merdeka di Asia Tengah dan Kaukasus dipandang sebagai subjek kepentingan yang potensial di bawah Presidensi Özal. Sampai kematiannya pada tahun 1993, ia berusaha untuk membuat Union Turki tapi percaya diri dan kata-kata tentang peran Turki dalam tatanan dunia baru yang jauh dari yang didasarkan pada realitas apapun dan menciptakan harapan ilusi. Dia juga melakukan upaya-upaya untuk menormalkan hubungan internasional dengan Uni Eropa. Namun demikian, ini terganggu oleh kudeta militer. Selain itu, Özal mencoba untuk menormalkan hubungan Turki dengan

negara-negara seperti Rusia dengan menekankan pentingnya perdagangan dan kepentingan ekonomi.

Pada tahun 1987, Turki mengajukan permohonan untuk keanggotaan resmi untuk Masyarakat Eropa. Pada bulan Desember 1989, Komisi Eropa menanggapi dengan menegaskan keanggotaan akhirnya Ankara, tetapi juga menyatakan keprihatinan atas kinerja ekonomi dan politik situasi miskin Turki, serta hubungan bermasalah dengan Yunani dan konflik atas Siprus. Posisi ini dilanjutkan dengan Dewan Eropa Luksemburg pada tahun 1997. pembicaraan Akses yang berlangsung dengan Siprus dan beberapa Tengah dan negara-negara Eropa Timur, tetapi Turki dikeluarkan dari proses, yang adalah kekecewaan besar bagi Turki. Namun, Dewan *Summit* Eropa Helsinki pada tahun 1999 merupakan tonggak sejak Uni Eropa diakui Turki sebagai kandidat.

Masalah yang sedang berlangsung dengan Yunani di atas Laut Aegea dan Siprus diserahkan ke Uni Eropa dan langsung terhubung ke jadwal, dalam rangka pencalonan Turki untuk keanggotaan Uni Eropa, di Helsinki Summit 1999. Hubungan dengan Amerika Serikat terus menjadi dekat. Penggunaan pangkalan militer Turki oleh Amerika Serikat terus selama pemboman Irak pada tahun 1991. AS dipandang sebagai sekutu strategis dan Turki berafiliasi dengan kebijakan penahanan Iran dan Irak. Takut penyebaran Islam radikal dari Iran dan proyek untuk memastikan bahwa PKK tidak memiliki kemungkinan untuk mendirikan sebuah negara Kurdi merdeka di wilayah Tenggara membuat Turki bekerja sama dengan Amerika Serikat. Selain itu, Turki dan Amerika Serikat, sebagai sekutu

NATO, memainkan peran kunci dalam proses perdamaian di Somalia, Bosnia, Kosovo dan Afghanistan sementara fungsi NATO berubah selama periode ini setelah pembubaran Blok Komunis. Hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang tenang karena pengakuan Turki Israel tetapi dalam proses perdamaian Arab-Israel Turki mencoba untuk memainkan peran perantara (Foreign Policy of the Turkish Republic, 2011). Namun, hubungan dengan Timur Tengah masih sangat tidak begitu baik.

B. Hubungan Turki dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*)

NATO adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1949 yang bertujuan untuk keamanan bersama. NATO didirikan sebagai bentuk dukungan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Sampai sekarang NATO beranggotakan 28 negara (What is NATO?).

Turki resmi bergabung dengan keanggotaan NATO pada tahun 1952. Turki menjadi anggota NATO karena krisis selat-selat Turki (Dardanelles dan Bosphorus) yang merupakan bagian dari konflik teritorial masa Perang Dingin (*Cold War*) antara Uni Soviet dan Turki. Turki yang pada saat akhir Perang Dunia II di posisi netral mendapatkan tekanan dari pemerintah Uni Soviet untuk membebaskan pelayarannya melalui kedua selat yang menghubungkan antara Laut Hitam dan Laut Tengah (Mediterrania). Padahal kedua selat penghubung Laut Hitam dan Laut Mediterania ini sangat penting untuk akses perdagangan Turki negara-negara lain. Pemerintah Turki hanya diam menanggapi tekanan Uni Soviet dan membuat suhu perpolitikan meningkat tajam. Uni Soviet

membalas sikap Turki dengan menempatkan kekuatan laut di dekat perbatasannya. Pada puncak krisis Turki meminta bantuan Amerika Serikat dengan menjadi anggota NATO. Bagi Amerika Serikat, insiden ini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Doktrin Truman yang akan memperluas hegemoni Amerika Serikat pada waktu itu. Amerika Serikat akhirnya memuluskan langkah Turki menjadi anggota NATO.

Keputusan Turki meminta bantuan Amerika Serikat sangat tepat ketika dihadapkan pada peluang akses luas untuk ekonomi Turki yang hampir diambil Uni Soviet. Karena waktu itu Uni Soviet, Rumania, dan Bulgaria berada pada satu pihak Pakta Warsawa yang berlawanan arah dengan NATO. Posisi kedua selat ini menjadi sangat strategis dalam menempatkan militer NATO dan Pakta Warsawa dimana kendalinya akan mempengaruhi strategi perang di wilayah tersebut. Keputusan Turki dalam menjadi anggota NATO ini akhirnya terus mempengaruhi politik luar negeri Turki hingga kini (Waspodo, 2015).

Turki termasuk negara yang berperan penting di NATO. Militer Turki juga militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat, dan selama ini Turki telah terlibat dalam semua operasi NATO di Afghanistan, Balkan, Suriah dan Libya. Sebuah Komando tingkat tinggi juga didirikan di Istanbul. Turki juga mendukung *The Partnership for Peace Training Center* yang dimulai pada tahun 1998. Dalam *partnership* ini, Turki dengan *Turkish General Staff* berupaya untuk berkontribusi pada upaya pelatihan dari negara-negara mitra NATO. Turki juga menyediakan pangkalan udara besar untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dengan

sekitar 2.000 tentara di Bandara Incirlik Turki dekat kota Adana. Incirlik sendiri memainkan peran penting dalam perang di Teluk Persia dan misi Afghanistan NATO. Sekitar 250 tentara Jerman dengan Tornado pesawat pengintai dan pesawat pengisian bahan bakar juga sementara ditempatkan di sana. Turki juga menjadi salah satu *host* dari lima markas NATO yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan operasi besar pasukan darat di kota pelabuhan barat Izmir. Secara keseluruhan, diperkirakan 20 lokasi di Turki digunakan oleh pasukan NATO. Terakhir, NATO memasang rudal sistem radar pertahanan Eropanya di Turki. (Riegert, NATO and Turkey: Allies, not friends, 2016).

Turki juga mendukung kemitraan strategis NATO dengan Uni Eropa, dan negara Balkan Barat seperti Kosovo ataupun Makedonia. Turki menyatakan dengan adanya mitra NATO dengan negara Balkan Barat ini akan menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Turki dalam bentuk dukungannya dengan NATO berpendapat bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari keamanan Mediterania, sehingga Dialog Mediterania dengan NATO harus diperkuat. Turki setuju untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Teluk melalui *Istanbul Cooperation* (Turkey's Relations with NATO).

C. Hubungan Turki Dalam Upayanya Menjadi Anggota Uni Eropa

Upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa sebenarnya jauh sebelum adanya Uni Eropa seperti sekarang. Pada tanggal 31 Juli 1959, Turki sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota *European Economic Community* (EEC). Pada tahun 1963, Perjanjian Ankara ditandatangani

antara EEC dan Turki, dan pada tahun 1965 dilakukan penambahan protokol di perjanjian Ankara mempersiapkan Turki masuk *Custom Union* bersama EEC (Chronology of Turkey – European Union Relations (1959-2015), 2015). Protokol tambahan ini berisi kesepakatan kawasan perdagangan bebas antara Turki dan Uni Eropa itu diperluas ke sembilan negara anggota baru Uni Eropa termasuk Siprus dan Yunani (Turki Kandidat Anggota "Abadi" Uni Eropa?, 2010). Pada 14 Maret 1987, Turki mengajukan diri menjadi anggota penuh di Uni Eropa (Chronology of Turkey – European Union Relations (1959-2015), 2015).

Prospek keanggotaan Uni Eropa pada Turki berpeluang besar di tahun 1996, ketika Turki masuk di EU (*European Union*) *Customs Union*. Ini menandai bahwa kedudukan Turki menjadi lebih tinggi daripada integrasi ekonomi dan merupakan awal keanggotaan Uni Eropa secara penuh. Meskipun begitu, akses untuk Turki menjadi anggota Uni Eropa tidak segera dilaksanakan. Hingga pada tahun 1997, Dewan Eropa di Luxemburg memberikan keputusan bahwa Turki untuk sementara belum memenuhi standar masuk dalam calon kandidat keanggotaan Uni Eropa (Tocci, 2014, p. 2). Pada tahun 1999 dalam Helsinki Summit, akhirnya Turki disebut sebagai kandidat dalam keanggotaan Uni Eropa dan memulai untuk melakukan negosiasi (Turkey-EU Relations). Namun, pembicaraan mengenai akses untuk Turki dalam keanggotaan Uni Eropa masih jauh dari kenyataan.

Turki diminta Dewan Uni Eropa untuk memenuhi Kriteria Politik Kopenhagen. Kriteria Kopenhagen (*Copenhagen Criteria*) ini sendiri

berisi 35 bab aturan yang harus dipenuhi negara apabila negara tersebut menginginkan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Kriteria yang ditetapkan Dewan Eropa pada Juni 1993 di Kopenhagen Denmark ini mengharuskan negara memiliki lembaga untuk mempertahankan pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia, memiliki mekanisme ekonomi pasar, dan mematuhi kewajiban dan tujuan dari Uni Eropa. Dalam hal ini, Turki diminta untuk menyelesaikan masalah Siprus (Tocci, 2014, p. 2). Sebagai gantinya, Komisi diberi mandat untuk memantau kemajuan kinerja domestik Turki juga menyusun dokumen Akses Kemitraan bagi Turki dalam kaitannya merekomendasikan Turki. Uni Eropa juga menaikkan bantuan keuangan ke Turki, hal ini untuk memberikan dukungan yang lebih eksplisit untuk reformasi Turki agar bisa menjadi anggota Uni Eropa (Tocci, 2014, p. 2).

Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya, upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa diisi dengan negosiasi Turki untuk menyesuaikan dengan Kriteria Kopenhagen. Percepatan reformasi Turki diawali pada akhir tahun 2001, yang banyak disebut sebagai *silent revolution*. Disebut *silent revolution* karena revolusi yang dimaksud lebih kepada penyesuaian Undang-Undang dengan Kriteria Kopenhagen (Tocci, 2014, p. 2). Pada tahun 2002 Turki mengeluarkan *Harmonization Package*. *Harmonization Package* merupakan istilah acuan untuk RUU yang terdiri dari kumpulan amandemen berbagai hukum yang disetujui atau ditolak dalam sesi voting tunggal di parlemen. Bidang-bidang hukum yang disesuaikan sebagai proses negosiasi akses kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul atau

kesetaraan gender (Turkey M. o., 2007, p. 4). Pada tahun 2001, Turki memperkenalkan ketentuan baru yang sesuai dengan *National Programme for the Adoption of the Acquis* (NPAA), yakni Undang-Undang tentang perlawanan terhadap teroris, kebebasan berpikir dan berekspresi, pencegahan terhadap penyiksaan, penguatan demokrasi dan otoritas sipil, kebebasan dan keamanan individu, hak privasi, kebebasan bertempat tinggal (*the inviolability of the domicile*), kebebasan komunikasi, kebebasan tinggal dan bergerak (*movement*), kebebasan berserikat dan kesetaraan gender. Turki juga menghapuskan hukuman mati dalam konstitusinya pada tahun 2004 (Turkey M. o., 2007). Turki sebenarnya sudah mendapatkan lampu hijau untuk menjadi anggota Uni Eropa pada bulan Desember 2002 karena Dewan Eropa Kopenhagen menyatakan akan menentukan apakah dan kapan untuk membuka pembicaraan akses dengan Turki pada bulan Desember 2004.

Turki berhasil membuka 12 bab dalam *Chapter of the Acquis* yang harus dipenuhi sebagai calon anggota Uni Eropa. Bab tersebut antara lain : bab 4 tentang Gerakan Modal (*Free Movement of Capital*); bab 6 tentang Hukum Perusahaan (*Company Law*); bab 7 tentang Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Law*); bab 10 tentang Masyarakat yang Berwawasan dan Media (*Information Society and Media*); bab 12 tentang Keamanan Pangan, Kedokteran Hewan dan Kebijakan *Phytosanitary* (*Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy*); bab 16 tentang Perpajakan (*Taxation*); bab 18 tentang Statistik (*Statistics*); bab 20 tentang Enterprise dan Kebijakan Industri (*Enterprise and Industrial Policy*); bab

21 tentang Jaringan Trans-Eropa (*Trans-European Networks*); bab 27 tentang Lingkungan (*Environment*); bab 28 tentang konsumen dan Perlindungan Kesehatan (*Consumer and Health Protection*); bab 32 tentang Kontrol Keuangan (*Financial and Budgetary Provisions*), sedangkan bab 25 tentang Ilmu Pengetahuan dan Penelitian (*Science and Research*) yang juga diajukan belum disetujui untuk dibuka. Ini terjadi sebelum AKP menang di Pemilu 2003 (Turkey-EU Relations).